



JEP

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 – 9595
Volume 7 No 2 Juli 2018

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Tenaga Kerja Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Pulau Sumatera
Taufiqur Rahman , I Wayan Suparta , Arivina Ratih Taher

Pengaruh Belanja Pegawai, *Mandatory Spending*, Dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Space* Seluruh Provinsi
Di Sumatera
Aditia Rinaldi , Marselina, I Wayan Suparta

Dampak Ekspor Dan Populasi Terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) Di Indonesia Periode 1980 Hingga 2015
Ferri Kuswantoro

The Effect Of Government Governance And *Tax Ratio* To
Economic Growth (Case Study In Asean Countries)
Finidya Demarani

Nilai Tambah Pada Industri Ikan Kering Tipis Di Juata Laut
Sulistya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati

Model Data Panel Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah
Irma Febriana MK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng
Bandar Lampung 35145
e-mail : jepep.feb@gmail.com
website : ep.feb.unila.ac.id

The Effect Of Government Governance And Tax Ratio To Economic Growth (Case Study In Asean Countries)

Finidya Demarani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
email: finidyad@gmail.com

Abstract

Good government governance and tax ratio can affect economic growth in a country. The performance of the country's economy is good, indicated by the high rate of economic growth. The purpose of this study is to convince and prove whether tax ratio, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and corruption control as a set of good governance affect in economic growth, using data from 6 countries in ASEAN.

Keywords: *Government governance, tax ratio, economic growth*

Abstrak

Tata kelola pemerintahan yang baik dan rasio pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kinerja perekonomian negara yang baik, ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meyakinkan dan membuktikan apakah rasio pajak, efektifitas pemerintah, kualitas peraturan, rule of law dan pengendalian korupsi sebagai seperangkat tata kelola pemerintahan yang baik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data dari 6 negara di ASEAN.

Keywords: *Tata kelola pemerintahan, rasio pajak, pertumbuhan ekonomi*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat-nya terhadap barang dan jasa. Kinerja perekonomian negara ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Menurut Kuznet dalam Jhingan (2012), pertumbuhan

ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya: kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idelogis yang diperlukannya.

Kinerja perekonomian negara yang baik, salah satunya ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang

tinggi. Menurut Kartika Dewi dkk (2015), pertumbuhan ekonomi selama ini baru dianalisis dari faktor-faktor ekonomi semata seperti pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), investasi, inflasi, suku bunga dan faktor-faktor yang sifatnya kuantitatif dan belum banyak yang meneliti dari sisi tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menarik karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang efisien (Tri Widodo 2014).

ASEAN memiliki anggota 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Anggota ASEAN semuanya menggunakan sistem perpajakan progresif dimana individu dikenai pajak sesuai dengan jumlah yang mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan individu dengan gaji lebih tinggi dikenai pajak dengan tarif lebih tinggi daripada mereka yang memiliki tingkat yang lebih rendah (Dezan Shira, 2016). Menurut William Gale dan Andrew (2016) tidak semua penerimaan pajak memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Reformasi yang memperbaiki insentif, mengurangi subsidi distorsi yang ada, hindari keuntungan *windfall*, dan menghindari defisit pembiayaan akan memiliki efek yang lebih baik pada jangka panjang ukuran ekonomi, tapi mungkin juga menciptakan *trade-off* antara ekuitas dan efisiensi. Menurut Huang dan Frenz (2014) kenaikan tarif pajak dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi sehingga pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Selain pajak, juga di pengaruhi oleh tata kelola pemerintahan. Pentingnya pemerintahan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan tata pemerintahan yang baik dimasukkan sebagai salah satu tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs). Tata kelola pemerintahan menurut *World Bank* memiliki empat dimensi yaitu *government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption* sehingga diduga ke empat unsur tata kelola pemerintahan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. (*World Bank*, 2017)

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Tahun 2006 – 2015 (dalam persen)

N O	NEGARA	TAHUN										RATA - RATA	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	BRUNEI D	4,4	0,16	1,94	-1,7965	2,6	3,75	0,91	-2,126	2,35	-0,567	0,304	
2	FILIPINA	5,24	6,62	4,15	1,15	7,63	3,66	6,68	7,06	6,15	6,07	5,441	
3	INDONESIA	5,5	6,35	6,01	4,63	6,22	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,636	
4	KAMBOJA	10,77	10,23	6,69	0,09	5,96	7,07	7,31	7,43	7,07	7,04	6,966	
5	LAOS	8,62	7,6	7,83	7,5	8,53	8,04	8,03	8,03	7,61	7,27	7,906	
6	MALAYSIA	5,59	9,43	3,32	-2,526	6,98	5,29	5,47	4,69	6,01	4,97	4,922	
7	MYANMAR	13,08	11,99	10,26	10,55	9,63	5,59	7,33	8,43	7,99	7,29	9,214	
8	SINGAPURA	8,86	9,11	1,79	-0,603	15,24	6,22	3,87	5	3,57	1,93	5,498	
9	THAILAND TIMOR	4,97	5,44	1,73	-0,691	7,51	0,84	7,24	2,73	0,92	2,94	3,362	
10	LESTE	-	11,4	14,2	12,96	10,42	2	8,06	5,79	2,88	5,86	4,3	7,020
11	VIETNAM	5,714	5	5,66	5,4	6,42	6,24	5,25	5,42	5,98	6,68	6,133	

Sumber: *World Bank* 2017 (diolah)**Tabel 2. Tax Ratio di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 (dalam persen)**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA- RATA
1	FILIPINA	13,71	13,53	13,7	12,22	12,93	13,21	14,06	14,47	14,77	13,62	13,622
2	INDONESIA	12,26	12,43	13,30	11,06	11,23	12,08	12,47	12,4	11,97	10,74	11,994
3	KAMBOJA	8,17	9,69	10,55	9,64	10	10,15	11,08	11,97	14,76	14,16	11,017
4	MALAYSIA	14,51	14,3	20,22	14,94	13,33	14,79	15,61	15,31	14,83	14,29	15,213
5	SINGAPURA	11,89	12,88	22,5	13,07	12,98	13,3	13,83	13,52	13,93	13,63	14,153
6	THAILAND	15,63	15,14	17,3	14,19	15,39	17,63	16,83	18,69	17,18	16,28	16,426

Sumber: *World Bank* 2017, diolah**Tabel 3. Government Effectiveness di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 (indeks)**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA- RATA
1	FILIPINA	-0,04	0,09	0,03	-0,03	-0,02	0,08	0,11	0,12	0,19	0,11	0,064
2	INDONESIA	-0,34	-0,28	-0,23	-0,28	-0,19	-0,25	-0,27	-0,19	-0,01	-0,22	-0,226
3	KAMBOJA	-0,96	-0,87	-0,96	-0,91	-0,92	-0,85	-0,81	-0,91	-0,68	-0,69	-0,856
4	MALAYSIA	1,22	1,24	1,11	0,99	1,13	1,03	0,93	1,01	1,14	0,96	1,076
5	SINGAPURA	2,18	2,38	2,43	2,28	2,25	2,17	2,17	2,09	2,19	2,25	2,239
6	THAILAND	0,42	0,37	0,23	0,28	0,2	0,21	0,22	0,24	0,34	0,36	0,287

Sumber: *World Bank* 2017, diolah**Tabel 4. Regulatory Quality di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 (indeks)**

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA- RATA
1	FILIPINA	-0,15	-0,1	-0,06	-0,09	-0,21	-0,21	-0,05	-0,06	-0,01	-0,04	-0,098
2	INDONESIA	-0,33	-0,31	-0,32	-0,34	-0,39	-0,33	-0,26	-0,18	-0,1	-0,21	-0,277
3	KAMBOJA	-0,58	-0,47	-0,44	-0,47	-0,46	-0,57	-0,34	-0,34	-0,4	-0,48	-0,455
4	MALAYSIA	0,56	0,53	0,33	0,31	0,6	0,59	0,58	0,65	0,84	0,77	0,576
5	SINGAPURA	1,77	1,83	1,9	1,8	1,8	1,8	1,97	1,98	2,23	2,26	1,934
6	THAILAND	0,26	0,16	0,23	0,24	0,19	0,22	0,25	0,23	0,27	0,3	0,235

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Selain *government effectiveness*, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh *regulatory quality*. Marlina (2016) menemukan bahwa *regulatory quality* merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Sehingga *regulatory quality* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara ASEAN. Namun menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) yang juga menganalisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa *regulatory quality* yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, *regulatory quality* ini masih belum dapat dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila para pembuat kebijakan dan *rent seeker* masih mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penerapan

kebijakan tersebut. Berikut ini disajikan perkembangan *regulatory quality* di 6 negara ASEAN.

Adapun *rule of law* yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara terutama 6 negara ASEAN. *Rule of law* merupakan satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik sebab *rule of law* mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawabnya. *Rule of law* mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Edy (2013), *rule of law* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan hasil bahwa apabila terjadi peningkatan pada kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan menegakkan hukum maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Hasil senada

juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Resnick dan Birner (2006) yang menemukan adanya hubungan positif antara *rule of law* mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Haggard dan Tiede (2010) juga menganalisis hubungan kausalitas antara *rule of law* dengan pertumbuhan ekonomi, mereka menemukan bahwa *rule of law* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju. Berikut ini disajikan perkembangan *rule of law* di 6 negara ASEAN.

Namun juga pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh *control of corruption*. Menurut *World Bank*, *control of corruption* yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi. *Control of corruption* berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan jika *control of corruption* di negara ASEAN naik, hal tersebut akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) *control of corruption* menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, *control of corruption* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Aidt, Dutta, dan Sena (2008) juga menganalisis pengaruh antara *corruption perception index* dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara yang mempunyai kualitas institusi rendah, maka korupsi tinggi sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini disajikan perkembangan *control of corruption* di 6 negara ASEAN.

Tabel 5. Rule of Law di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 (indeks)

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	-0,41	-0,48	-0,56	-0,6	-0,58	-0,54	-0,54	-0,42	-0,33	-0,35	-0,481
2	INDONESIA	-0,73	-0,68	-0,66	-0,59	-0,64	-0,61	-0,59	-0,54	-0,35	-0,41	-0,58
3	KAMBOJA	-1,19	-1,09	-1,11	-1,09	-1,09	-1,02	-0,96	-0,98	-0,93	-0,92	-1,038
4	MALAYSIA	0,53	0,5	0,38	0,49	0,53	0,52	0,5	0,47	0,64	0,57	0,513
5	SINGAPURA	1,63	1,65	1,64	1,6	1,68	1,73	1,78	1,75	1,89	1,88	1,723
6	THAILAND	-0,03	-0,09	-0,14	-0,22	-0,2	-0,21	-0,16	-0,13	-0,15	-0,11	-0,144

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Tabel 6. Control of Corruption di 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015 (indeks)

NO	NEGARA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RATA-RATA
1	FILIPINA	-0,82	-0,7	-0,75	-0,77	-0,8	-0,7	-0,58	-0,4	-0,44	-0,43	-0,639
2	INDONESIA	-0,81	-0,58	-0,56	-0,82	-0,74	-0,68	-0,66	-0,62	-0,58	-0,45	-0,65
3	KAMBOJA	-1,23	-1,1	-1,2	-1,16	-1,23	-1,22	-1,04	-1,01	-1,08	-1,04	-1,131
4	MALAYSIA	0,29	0,25	-0,03	-0,03	0,13	0,05	0,27	0,39	0,48	0,28	0,208
5	SINGAPURA	2,2	2,25	2,25	2,25	2,21	2,12	2,17	2,09	2,12	2,13	2,179
6	THAILAND	-0,36	-0,34	-0,4	-0,28	-0,31	-0,29	-0,34	-0,33	-0,41	-0,4	-0,346

Sumber: *World Bank* 2017, diolah

Kajian Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain:

Teori Keynes

Teori ekonomi Keynes berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami

bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laizes-faire capitalism* (teori kapitalisme). Teori Keynes mengecam

kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya dari pada menyimpannya yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogenous

Teori pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam suatu sistem (Romer, 2007). Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik mengenai *diminishing marginal productivity of capital* dan konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Hal ini karena pada negara-negara yang sudah maju, telah mengembangkan

teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Teori pertumbuhan endogen memiliki tiga elemen didasari yakni, pertama, perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan; kedua, adanya penciptaan ide baru oleh perusahaan sebagai akibat adanya mekanisme *spillover* dan *learning by doing* dan ketiga, produksi barang barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan yang tumbuh tanpa batas. (Rivera Butiz dan Romer. 2007.)

Rasio Pajak (Tax Ratio)

Tax ratio atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam persen. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Karena semakin tinggi juga nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari

setiap rupiah output nasional (GDP) (Tisa Amelia, 2014). *Tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan telah lama diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Meski demikian, terdapat sejumlah perdebatan mendasar yang mengemukakan tentang *tax ratio* ini.

Masalah penerimaan pajak. Jumlah penerimaan perpajakan manakah yang kita jadikan faktor pembilang, apakah hanya merupakan pajak pusat ataukah melingkupi pajak daerah juga, apakah hanya merupakan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak saja ataukah termasuk pula pajak lain yang tidak dikelola oleh Ditjen Pajak, serta apakah hanya merupakan pajak yang diterima secara utuh oleh Ditjen Pajak ataukah termasuk restitusi, dan pajak ditanggung Pemerintah. Jadi, sesungguhnya persoalan besaran *tax ratio* mungkin menjadi *uncomparable* antar negara, kecuali terdapat lembaga survei tersendiri yang melakukan perhitungan *tax ratio* secara terintegrasi dengan metodologi yang sama seperti yang dilakukan OECD terhadap negara-negara anggotanya. Bila mengacu pada perhitungan *tax ratio*, jelas bahwa jumlah penerimaan perpajakan yang

dijadikan acuan sebagai faktor pembilang *tax ratio* tidak meliputi pajak daerah, restitusi dan fasilitas perpajakan. Meski demikian, bila dilakukan modifikasi terhadap jumlah penerimaan perpajakan ini tetap saja *tax ratio* kita masih ketinggalan dibandingkan beberapa negara tetangga dalam kawasan regional tertentu, apalagi bila kita membandingkannya dengan negara yang telah maju. Dalam hal ini, persoalan utamanya memang adalah bagaimana upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan agar *tax ratio* kita mengalami peningkatan. Namun meskipun demikian sulit bagi pemerintah untuk menaikkan *tax ratio*, selama masih ada praktek-praktek *hidden economy* yang meliputi sumbangan-sumbangan politik, sumbangan-sumbangan bagi pejabat, birokrasi, dan sebagainya, (Bisnis Indonesia.13 November 2008)

Masalah PDB (Produk Domestik Bruto). Masalah lain dalam keruwetan *tax ratio* ini adalah perdebatan mengenai faktor pembagi dalam formula *tax ratio*, yaitu nilai produk domestik bruto (PDB). Masalah klasik berupa konsep harga yang secara konsep mengandung makna distorsi, proses

imputasi dalam penghitungan PDB serta kemungkinan tidak tercatatnya sektor informal bahkan ekonomi bawah tanah (*underground economy*).

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola yang baik adalah yang melakukan tugasnya dan memenuhi tantangannya secara efektif, efisien, dan dengan cara yang berkontribusi terhadap legitimasi kewenangan. Legitimasi dapat ditunjukkan dalam beberapa cara, keduanya aktif dan pasif. Ini tidak memerlukan pemilihan yang bebas dan adil. Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa

kebangsaan yang tinggi. Menurut UNDP (2016), *good governance* mempunyai enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan.

Indeks Tata Kelola Pemerintahan (World Governance Index/WGI)

Dalam tataran implementatif, guna mewujudkan *good governance* maka diperlukan metode untuk mengukur kapasitas *good governance* itu yang sering disebut sebagai pengukuran *Indeks Good Governance* (IGG). Pengukuran mengenai indeks tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks yang disusun oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun, selain indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Secara umum, berbagai pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* dengan berlandaskan pada konsep *governance* yang antara lain terutama mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*).

Indikator Tata Kelola Dunia (Worldwide Government Indicators / WGI)

World Bank melalui *Macroeconomics and Growth Team Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu: *control of corruption*, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *voice and accountability*. Setiap indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 sampai dengan 2,5. Dimana angka -2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5 menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* di negara tersebut dinilai terbaik.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dalam bentuk data panel yaitu kombinasi data *time series* dan *cross section*. Data *cross section* dalam penelitian ini adalah data 11 negara-negara ASEAN dengan *time*

series periode 2006 sampai 2015. Data masing-masing variabel didapat dari *World Bank*.

Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, *tax ratio*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* sebagai variabel independen.

Model struktural yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yaitu:

$$Y = \alpha + \alpha_1 TR_{it} + \alpha_2 GE_{it} + \alpha_3 RQ_{it} + \alpha_4 RL_{it} + \alpha_5 CC_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi (%)
TR	=	Tax Ratio (%)
GE	=	Government Effectiveness (indeks)
RQ	=	Regulatory Quality (indeks)
RL	=	Rule of Law (indeks)
CC	=	Control of Corruption (indeks)
α_1	=	Koefisien
α	=	Intercept
i	=	Periode
t	=	Negara

Sebelum data diolah, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Beberapa asumsi klasik yang harus diuji dalam model yang akan digunakan dalam

penelitian antara lain sebagai berikut:

Normalitas

Uji asumsi normalitas untuk melihat apakah *error term* terdistribusi secara normal atau tidak. Jika asumsi normalitas tidak dipenuhi maka prosedur pengujian dengan uji *t-statistic* menjadi tidak sah.

Multikolinearitas

Uji asumsi multikolinearitas dilakukan untuk memastikan model terbebas dari masalah multikolinearitas. Suatu model yang terbebas dari multikolinearitas berarti tidak ada hubungan linear antar variable bebasnya (independen).

Heteroskedastisitas

Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi dari *error* bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji *White*. Model dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistic *white* ($n \times R^2$) lebih besar dari χ^2 tabel.

Autokorelasi

Suatu model yang terbebas dari autokorelasi terjadi jika antara pengamatan yang satu dengan

pengamatan lainnya tidak ada keterkaitan atau saling bebas (independen).

Setelah data diolah dengan uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian dengan metode data panel yang terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model data panel yaitu metode *Pooled Least Squares* (PLS), metode *Fixed Effect* (FEM), metode *Random Effect* (REM).

Metode *Pooled Least Squares* (PLS)

Pendekatan PLS ini menggunakan metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana yang memiliki intersep dan *slope* yang konstan.

Metode *Fixed Effect* (FEM)

Pada metode FEM, intersep dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik sendiri. Dalam membedakan intersepnnya dapat digunakan peubah *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Metode *Random Effect* (REM)

Pendekatan REM, intersep tidak lagi dianggap konstan, melainkan dianggap sebagai peubah *random*.

Untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, maka dilakukan uji

kesesuaian model melalui beberapa tahapan yaitu dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*.

Uji *Chow* digunakan untuk memilih teknik dengan metode PLS atau FEM. Pengujian ini dikenal dengan istilah uji *Chow* atau *Likelihood Test Ratio*.

Uji *Hausman* berperan dalam memilih model FEM atau REM yang lebih baik, dapat pula dilakukan pengujian terhadap asumsi ada atau tidaknya korelasi antara regresor dan efek individu.

Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain koefisien determinasi (R^2), uji F-statistik, dan uji t-statistik.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R^2 terletak antara nol hingga satu. Semakin mendekati nilai satu maka model akan semakin baik.

Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-statistik yang besar lebih baik dibandingkan dengan nilai F-statistik yang rendah. Nilai *Prob* (F-statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-statistik.

Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera* untuk menguji normalitas. Uji normalitas terdapat di lampiran 1 Gambar 2. Uji *Jarque-Bera* menentukan bahwa apabila *asymptotic significance* dalam uji *Jarque-Bera* lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka data residual terdistribusi secara normal. Melihat hasil uji *Jarque-Bera* pada Gambar 1 bahwa nilai *probability* lebih besar dari tingkat signifikansi ($3099,570 > 00,05$) sehingga penelitian ini memiliki data residual yang terdistribusi normal.

Selain itu, pada lampiran 2 pada Tabel 9 menunjukkan bahwa kelima variabel independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai koefisien korelasi $< 0,8$. Hal ini dapat dilihat besarnya nilai *correlation* untuk variabel *Tax Ratio* (TR), *Government Effectiveness* (GE), *Regulatory Quality* (RQ), *Rule of Law* (RL), dan *Control of Corruption* (CC). Nilai *correlation* semua variabel kurang dari 0,8. Dengan demikian kelima variabel dapat digunakan untuk memprediksi Pertumbuhan Ekonomi (PE) selama periode pengamatan.

Adapun pada lampiran 3 pada Tabel 10 memperlihatkan bahwa Prob. F sebesar 0,3907 dengan $\alpha = 5\%$ maka hasil regresi tidak mengandung heteroskedastisitas, jika uji t dan probabilitas menunjukkan adanya variabel independen yang signifikan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki masalah heteroskedastisitas, dan apabila nilai statistik t hitung $<$ nilai kritis tabel t maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2013). Lampiran 3 menunjukkan probabilitas variabel independen tidak signifikan,

sehingga dalam penelitian ini tidak ada gejala heteoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji *White*.

Pada lampiran 4 pada Tabel 11 memperlihatkan bahwa nilai *Durbin Watson* berdasarkan hasil estimasi adalah sebesar 2,056231. Nilai d_L dan d_U pada tingkat signifikansi 5% dengan k sebanyak 5 dan n sebanyak 110 observasi sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Uji Chow

Menurut Widarjono (2013) Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih model pendekatan yang paling baik antara *common effect* dan *fixed effect* dengan melihat nilai distribusi F statistik, jika nilai probabilitas distribusi F statistik lebih dari nilai tingkat signifikansi yang ditentukan maka model yang digunakan adalah *common effect*, akan tetapi jika nilai probabilitas distribusi F statistik kurang dari tingkat signifikansi maka model yang digunakan adalah *fixed effect approach*.

Tabel 12. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: COMMON
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.796383	(5.49)	0.0055

Sumber: Output *Eviews8*, lampiran 5

Dari Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai Prob. *Cross-section F* sebesar 0,0055 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0055 < 0,05$) yaitu H_0 ditolak maka dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang baik digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan dan memilih antara *fixed effect* dan *random effect*. Uji ini menggunakan nilai *chi-square* dalam menentukan model terbaik yang digunakan dalam sebuah penelitian apabila *chi-square* lebih dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *random effect*, tetapi jika nilai *chi-square* kurang dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terpilih adalah model *fixed effect*. Dari Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai Prob. *Chi-square* sebesar 0,2528

lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H_0 diterima maka antara *fixed effect* dan *random effect*, model yang baik digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Kriteria Statistik

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil bukan berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 13. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: COMMON

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.591508	5	0.2528

Sumber: Output *Eviews8*, lampiran 6

Nilai R^2 menunjukkan nilai 0,414681. Hal ini mengindikasikan bahwa 41% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh *tax ratio*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* sedangkan 59% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik diperlihatkan pada tabel:

Dari hasil Tabel 15 diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,000038. Nilai F-statistik ini lebih kecil dibandingkan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi

Tabel 15. Hasil Uji F-statistik

Df=(k-1;n-k)	α	F-tabel	F-Statistik	Kesimpulan
(5;49)	5%	0.281	0.000038	Menolak H_0

Sumber: Output *Eviews8*, lampiran 8

(α) 5%, sehingga H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *tax ratio*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 6 Negara ASEAN selama tahun 2006-2015.

4.3.3 Uji t-statistik

Uji t-statistik dilakukan untuk melihat apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada Tabel 16. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat $\alpha = 0,05$ diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji t-statistik

Variabel	Probabilitas
TR	0.0678**
GE	0.0173*
RQ	0.0014*
RL	0.0003*
CC	0.0044*

Sumber: Output *Eviews8*, lampiran 9

Keterangan : *) $\alpha = 5\%$
**) $\alpha = 10\%$

Setelah melakukan serangkaian pengujian, kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil estimasi yang diperoleh sebagai berikut.

Pengaruh *Tax Ratio* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 negara ASEAN

Negara-negara maju yang banyak mengalami *fiscal crisis*, terlebih negara-negara yang tergolong *low-income countries*, mereka harus meningkatkan rasio pajak kurang lebih 4% untuk mencapai *Millenium Development Goals* untuk mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur (UN, 2005). Gupta (2007) melakukan studi empiris di 105 negara berkembang dalam kurun waktu 25 tahun, kemudian diterbitkan dalam *IMF Working paper series*.

Gupta (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak diantaranya pendapatan perkapita, komposisi output sektoral, tingkat perdagangan internasional

(*trade openness*), bantuan dan hutang luar negeri, tingkat ekonomi informal, dan faktor institutional seperti korupsi dan stabilitas politik. Pendapatan perkapita menunjukkan kemajuan ekonomi secara keseluruhan dari suatu bangsa. Semakin besar pendapatan perkapita, sebuah negara akan dinilai semakin makmur. Sedangkan komposisi output sektoral menunjukkan struktur dari perekonomian negara yang lebih bergantung kepada pertanian cenderung lebih sulit untuk menarik pajak; negara agraris cenderung menghasilkan output yang lebih kecil dibanding negara industri karena produk pertanian memiliki nilai tambah yang kecil dan melibatkan pelaku yang banyak.

Pengaruh *tax ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN menunjukkan bahwa kenaikan pajak memiliki dampak negatif dan terus-menerus terhadap

GDP riil perkapita. Ukuran pengaruhnya tergantung pada bagaimana "tax shock" diukur, namun perkiraan menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak sebesar 1% dari PDB akan memiliki dampak jangka panjang terhadap PDB riil perkapita sebesar -0,5% untuk -1%. Ini lebih kecil dari Romer dan efek perkiraan Romer (2007) yang agak besar (kira-kira -3%), namun identifikasi "tax shock" tersebut sangat berbeda dan ukuran GDP adalah agregat (bukan perkapita). (Furceri dan Georgios, 2017)

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. *Tax ratio* di 6 negara ASEAN yang berfluktuatif dari 2006-2015. Dapat dilihat bahwa dari rata-rata *tax ratio* ASEAN, Kamboja memiliki *tax ratio* terendah yaitu sebesar 11,017% sedangkan Thailand memiliki *tax ratio* tertinggi sebesar 16,426%.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah didapat, nilai koefisien regresi *Tax Ratio* adalah sebesar -9,994813 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hal ini berarti setiap peningkatan *tax ratio* sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 9,99%, *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan penelitian Huang dan Frenzt (2014) menyatakan bahwa kenaikan pajak dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara jika tidak dikendalikan dengan baik maka dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh negatif. Menurut Gale dan Andrew (2016) bahwa tidak semua pajak akan memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi. Reformasi yang memperbaiki insentif, mengurangi subsidi distorsi yang ada, hindari keuntungan *windfall*, dan menghindari defisit pembiayaan akan memiliki efek yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bahkan dapat menciptakan *trade-off*.

Pengaruh Government Effectiveness terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 negara ASEAN

Pengaruh antara *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN. (Rafayet, 2017)

Indikator *government effectiveness* menurut *Millenium Challenge Corporation* yaitu: Mekanisme koordinasi yang efektif memastikan konsistensi kebijakan lintas batas departemen, dan struktur administrasi disusun di sepanjang garis fungsional dengan sedikit duplikasi. Selain itu, RUU upah pemerintah berkelanjutan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk layanan publik. Pendapatan pemerintah dihasilkan oleh pajak distorsi rendah, tarif impor rendah dan relatif seragam, rabat ekspor atau kekurangan tugas bersifat fungsional, basis pajaknya luas dan bebas dari pembebasan sewenang-wenang, administrasi perpajakan efektif dan berbasis aturan, dan biaya administrasi dan kepatuhan pajak rendah. Proyeksi pengeluaran multi tahun diintegrasikan ke dalam proses perumusan anggaran dan mencerminkan implikasi eksplisit dari implikasi kebijakan baru. Anggaran diformulasikan melalui konsultasi sistematis dengan kementerian pengeluaran dan legislatif, mengikuti kalender anggaran tetap, sistem klasifikasi anggaran komprehensif dan

konsisten dengan standar internasional dan pengeluaran di luar anggaran dijaga seminimal mungkin dan ditangani secara transparan. Anggaran di implementasikan sesuai rencana dan pengeluaran aktual hanya menyimpang dari tingkat yang direncanakan. Laporan keuangan tahun-tahun dan rekening publik disiapkan segera dan teratur dan memberikan data yang lengkap dan akurat.

Government effectiveness adalah ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Kualitas pelayanan publik di 6 negara ASEAN berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pada kualitas pelayanan publik yang memiliki data tertinggi yaitu Singapura sebesar 2,239 sedangkan yang memiliki data kualitas pelayanan publik terendah yaitu Kamboja sebesar -0,856.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah didapat, nilai koefisien regresi kualitas pelayanan publik adalah sebesar 304,8337 dengan tingkat

kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas pelayanan publik sebesar 1 indeks, maka pertumbuhan ekonomi akan positif sebesar 304,8 indeks, *ceteris paribus*. Apabila kualitas pelayanan publik meningkat lebih baik maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Wibowo (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena semakin baik dan efektif kualitas pelayanan publik suatu negara berarti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan memberikan pelayanan publik tersebut akan semakin kecil. Sehingga dengan berkurangnya biaya yang dikeluarkan oleh kedua pihak dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik, hal tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan publik suatu negara. Jadi makin baik kualitas pelayanan publik di suatu negara tersebut berarti pertumbuhan ekonominya semakin meningkat, karena pengeluaran yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dan pelayanan publik tersebut menjadi lebih efisien.

Penelitian ini juga didukung oleh Md Rafayet dkk (2017) yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan di ASEAN dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh *Regulatory Quality* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 negara ASEAN

Pengaruh *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN mengacu kepada undang-undang tata kelola perusahaan mendorong kepemilikan dan pengungkapan keuangan dan melindungi hak pemegang saham, dan umumnya diberlakukan intervensi negara di pasar barang dan lahan. Umumnya terbatas pada peraturan dan undang-undang untuk memperlancar ketidaksempurnaan pasar. Adapun layanan pabean bebas dari korupsi, beroperasi secara transparan, bergantung pada manajemen risiko, memproses koleksi tugas, dan mengembalikan uang segera. Serta undang-undang, peraturan, dan pedoman perdagangan diterbitkan, disederhanakan, dan dirasionalisasi. (*Millenium Challenge Corporation, 2017*)

Regulatory quality adalah ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan

kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Pelaksanaan kebijakan serta peraturan di 6 negara ASEAN berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari rata-rata pada pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang memiliki data tertinggi yaitu Singapura sebesar 1,934 sedangkan yang memiliki data pelaksanaan kebijakan serta peraturan terendah yaitu Filipina sebesar -0,098.

Berdasarkan hasil estimasi yang telah didapat, nilai koefisien regresi pelaksanaan kebijakan serta peraturan adalah sebesar 625,4829 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti setiap peningkatan pelaksanaan kebijakan serta peraturan sebesar 1 indeks, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 625,4 indeks, *ceteris paribus*. Apabila pelaksanaan kebijakan serta peraturan meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Marlina (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan serta peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) yang juga menganalisis pengaruh

kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan serta peraturan yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pelaksanaan kebijakan serta peraturan ini masih belum dapat dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila para pembuat kebijakan dan *rent seeker* masih mengabaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih berhak untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut.

Pengaruh *Rule of Law* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 negara ASEAN

Pengaruh *rule of law* terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN mengacu pada kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem peradilan, kepatuhan terhadap hukum, tradisi hukum dan ketertiban, kekuatan dan ketidakberpihakan sistem hukum. Selain itu juga independensi, efektivitas, prediktabilitas, dan integritas peradilan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, jalan hukum untuk menantang tindakan pemerintah, serta kemampuan untuk

menuntut pemerintah melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak. (*Millenium Challenge Corporation, 2017*)

Sehingga jika aturan hukum di taati oleh lapisan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN mengalami kenaikan, sebaliknya jika masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada maka pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN mengalami penurunan.

Rule of law adalah ukuran sejauh mana seseorang mematuhi aturan masyarakat dan menegakkan hukum. Penegakkan hukum di 6 negara ASEAN berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari rata-rata pada penegakkan hukum yang memiliki data tertinggi yaitu Singapura sebesar 1,723 sedangkan yang memiliki data penegakkan hukum terendah yaitu Kamboja sebesar -1,038.

Adapun penegakkan hukum yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara terutama 6 negara ASEAN. Penegakkan hukum merupakan satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik sebab penegakkan hukum mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan

yang korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawabnya. Penegakkan hukum mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil estimasi yang telah didapa, nilai koefisien regresi penegakkan hukum adalah sebesar -847.3894 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti setiap peningkatan penegakkan hukum sebesar 1 indeks, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 847,3 indeks, *ceteris paribus*. Penegakkan hukum meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Yilmaz Bayar (2016) menyatakan bahwa penegakkan hukum memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hasil senada juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Resnick dan Birner (2006) yang menemukan adanya hubungan positif antara penegakkan hukum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Haggard dan Tiede (2010) juga menganalisis hubungan

kausalitas antara penegakkan hukum dengan pertumbuhan ekonomi, mereka menemukan bahwa penegakkan hukum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju.

Pengaruh *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 6 negara ASEAN

Pengaruh *control of corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN mengacu pada otoritas pemerintah untuk memantau prevalensi korupsi dan menerapkan sanksi secara transparan. Sehingga warga negara memiliki hak hukum atas informasi tentang operasi pemerintah dan dapat memperoleh dokumen pemerintah dengan biaya nominal. Maka *control of corruption* di 6 negara ASEAN dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (*Millenium Challenge Corporation*, 2017)

Control of corruption adalah ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi. Pengendalian korupsi di 6 negara ASEAN berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari rata-rata pada pengendalian korupsi yang memiliki

data tertinggi yaitu Singapura sebesar 2,179 sedangkan yang memiliki data pengendalian korupsi terendah yaitu Kamboja sebesar - 1,131.

Menurut *World Bank*, pengendalian korupsi yaitu ukuran sejauh mana kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan tindakan korupsi.

pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan jika pengendalian korupsi di negara ASEAN naik, hal tersebut akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil estimasi yang telah didapat, nilai koefisien regresi pengendalian korupsi adalah sebesar 382,2922 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti setiap peningkatan pengendalian korupsi sebesar 1 indeks, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 382,2 indeks, *ceteris paribus*. Pengendalian korupsi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Daniel Kaufmann (2005) menyatakan bahwa kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah

secara signifikan. Menurut Huynh dan Jacho-Chávez (2009) pengendalian korupsi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Aidt, Dutta, dan Sena (2008) juga menganalisis pengaruh antara *corruption perception index* dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di negara yang mempunyai kualitas institusi rendah, maka korupsi tinggi sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Individu Effect Panel Data

Koefisien dan dampak kenaikan *individu effect* panel data pada 6 negara ASEAN dapat dilihat pada Tabel 17.

Pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa dari 6 negara ASEAN terdapat 3 negara yaitu Filipina, Indonesia, dan Kamboja memiliki nilai *individu effect* di atas indeks sebesar 2,5 yang menunjukkan

bahwa ketiga negara tersebut tata kelola pemerintahannya masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan 3 negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand memiliki tata kelola pemerintahan yang sangat baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya.

Tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik maka pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN hanya bergantung pada *tax ratio*, sumber daya alam, investasi, dan faktor lainnya di luar tata kelola pemerintahan seperti *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*.

Berdasarkan hasil uji regresi dan analisis data mengenai pengaruh tata kelola pemerintahan dan *tax ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 17. Nilai Individu Effect pada 6 Negara ASEAN tahun 2006-2015

<i>Individu Effect</i>		
No.	Negara	Effect
1	FILIPINA	227.2739
2	INDONESIA	331.8742
3	KAMBOJA	422.5987
4	MALAYSIA	-221.2540
5	SINGAPURA	-911.0089
6	THAILAND	150.5161

Sumber: Output *Eviews8*, lampiran 10

Simpulan Dan Saran

Tax Ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *tax ratio* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan sebaliknya jika *tax ratio* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.

Government Effectiveness menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *government effectiveness* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan jika *government effectiveness* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Regulatory Quality menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *regulatory quality* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan jika *regulatory quality* mengalami

penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Rule of Law berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomidi 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *rule of law* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dan sebaliknya jika *rule of law* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan.

Control of Corruption menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 6 negara ASEAN yang menunjukkan jika *control of corruption* mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dan jika *control of corruption* mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Individu effect pada Malaysia dan Singapura lebih rendah dibandingkan dengan 4 negara ASEAN lainnya dikarenakan tata kelola pemerintahan Malaysia dan Singapura yang baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Oleh karena itu, tanpa tata kelola pemerintahan dan *tax ratio* yang baik maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

Bahwa pertumbuhan ekonomi dapat di percepat dengan menegakkan aturan hukum, karena 6 negara ASEAN masih kurang menaati aturan hukum yang berlaku di negaranya masing-masing.

Hendaknya pemerintah mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan ekonomi.

Pemerintah, para pelaku ekonomi, maupun seluruh lapisan masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran akan penyelenggaraan dan penegakan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan *good governance*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

wujud penegakan *rule of law* yang merupakan indikator kualitas pemerintahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga pemerintah sebaiknya menurunkan *tax ratio* sehingga masyarakat tidak di bebankan dengan tingginya *tax ratio* disuatu negara sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Pustaka

ADB. 1998. *Annual Report*. Manila. Asian Development Bank (ADB).

Aidt, Toke, Jayasri Dutta dan Vania Sena. 2008. *Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence*. *Journal of Comparative Economics* 36 (2008) 195–220.

Alam, Rafayet, Erick Kitenge, and Bizuayehu Bedane. 2017. *Government Effectiveness and Economic Growth*. *Economic Buletin*. Vol 37 issue 1.

Amelia, Tisa. 2014. *Hubungan antara Tarif Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak: Analisis Data Negara-Negara ASEAN 1987-2011*. Institut Pertanian Bogor.

Arifiyadi, Teguh. (2008). *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. September 10, 2009.

- Ademola Azeez. 2009. *Contesting Good Governance in Nigeria: Legitimacy and Accountability Perspectives*. J Soc Sci, 21(3): 217-224. Department of Political Science, University of Ilorin, Nigeria.
- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition*. John Wiley & Sons.
- Basu, Sudip Ranjan, 2002. *Does Governance Matter? Some Evidence from Indian States*. Journal of VIIth Spring Meeting of Young Economists. University of Geneva, Switzerland.
- Bayar, Yilmaz. 2016. *Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union*. Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 48 E/2016, pp. 5-18.
- Dewi, Putu Kartika dan Nyoman Triaryati. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak terhadap Investasi Asing Langsung*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 4, 2015: 866-878.
- Djankov, S., McLiesh, C., Ramalho, R., 2006. *Regulation and Growth*. Econ. Letters 92 (3), 395–401.
- Dornbusch R dan Fischer S. 1994. *Buku Ekonomi Pembangunan* : 649-651. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dökmen, Gökhan. 2013. *Environmental Tax and Economic Growth : A Panel VAR Analysis*. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, Haziran-Aralık 2012 ss. 43-65.
- Gale, William dan Andrew Samwick. 2016. *Effects of Income Tax Changes on Economic Growth*. Brookings Institution and Tax Policy Center.
- Huang, Ching dan Nathaniel Frentz. 2014. *What Really Is the Evidence on Taxes and Growth?*. Center on Budget and Policy Priorities. 820 First Street NE, Suite 510. Washington, DC 20002.
- Huynh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. *Growth and Governance: A Nonparametric Analysis*. Journal of Comparative Economics 37 ; 121–143.
- Ikhsan, Surya dan Amri Amir. 2016. *Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4, April-Juni 2016 ISSN: 2338-4603.
- Jhingan ML, 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali, Press.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2005. *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*. World Bank

- Policy Research Working Paper No. 3630. Washington, D.C.
- Kaufmann, Daniel, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi. 2010. *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*.
- Lumban Gaol, Marlina. 2016. *Pengaruh Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marselina, Tri Joko Prasetyo. 2017. *Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Kepastian Hukum dan Pengendalian Korupsi terhadap Tingkat Ketaatan Pajak*. Artikel. Universitas Lampung.
- McEachern, William. 2001. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta. PT. Salemba Empat
- Nachrowi, D.N. dan H. Usman (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- OECD. 1997. *Good Government Assessment Methodology, Organization Economic Cooperation and Development (OECD)*. Paris.
- Ozpolat, Asli, Gulsum Gunbala Guven, Ferda Nakipoglu Ozsoy, dan Ayse Bahar. 2016. *Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?*. Research in World Economy Vol. 7, No. 1; 2016.
- Pasaribu, Rowland. *Tata Kelola Pemerintahan*. Hlm 397-400.
- Pradhan, Rudra P. dan G. S. Sanyal. 2011. *Good governance and Human Development: Evidence form Indian States*. Journal of Social and Development Science Vol. 1, No. 1, pp. 1-8.
- Purbadharmaja, Ida. 2010. *Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Resnick, Danielle dan Regine Birner. 2006. *Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth? A Review of Thevidence from Cross-Country Studies*. DSGD Discussion Paper No. 30.
- Riyad, Mohammad. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Enam Negara ASEAN tahun 1990-2009*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Rivera – Batiz, Fransisco L. 2007. *How Do Migrant from Latin America and the Carribbean Fare in the US Labor Market?*. World Economy. 30(9) : 1399-1429.
- Romer, P. 1990. *Endogenous Technical Change*. Journal of Political Economy. 98(5): S71-102.

- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Shira, Dezan. 2016. *An Introduction to Taxation in ASEAN*. ASEAN Briefing. Issue 3. May and June 2016.
- Tiede, Lydia. 2011. *The Rule of Law and Economic Growth: Where are We? World Development*. Vol. 39, No. 5, pp.: 673–685.
- UNDP (2008). *A Users' Guide to Measuring Corruption*. <http://www.globalintegrity.org/information/books>.
- Wibowo, Danny. 2015. *Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Economic Growth Rate, Economic Structure, dan Tax Rate Terhadap Tax Ratio Pada Negara-Negara OECD dan Indonesia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Wibowo, Edy. 2013. *Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Widodo, Tri. 2014. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta.
- Yong, Ong Keng. 2005. *The Role of Good Governance in ASEAN*. ASEAN-EC Regional Symposium. Bandar Seri Begawan, 28 November 2005.
- <https://www.mcc.gov/> diakses pada tanggal 20 September 2017.
- <http://www.wisegeek.org/what-is-keynesian-economics.htm> diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.
- <http://www.worldbank.org> diakses pada tanggal 20 September 2017.
- https://en.wikipedia.org/World_Governance_Index diakses pada tanggal 29 Oktober 2017.